

BAB V. SIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Simpulan

Berdasarkan hasil yang didapat dari penelitian ini, dapat disimpulkan yaitu:

1. Secara simultan variabel PDRB, jumlah penduduk, dan IPM berpengaruh terhadap konsumsi non pangan masyarakat di Barlingmascakeb tahun 2013-2022.
2. Secara parsial variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi non pangan masyarakat di Barlingmascakeb tahun 2013-2022. Hal ini karena peningkatan PDRB dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas serta PDRB dapat menjadi pendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Sehingga PDRB dapat berperan dalam mendorong daya beli masyarakat terhadap konsumsi non pangan.
3. Secara parsial variabel Jumlah Penduduk secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap konsumsi non pangan masyarakat di Barlingmascakeb tahun 2013-2022. Hal ini dikarenakan masih cukup tingginya penduduk usia tidak produktif dan tingkat pengangguran terbuka yang ada di wilayah Barlingmascakeb sehingga dapat menambah beban tanggungan keluarga. Kondisi tersebut dapat menurunkan daya beli konsumsi non pangan karena pendapatan yang didapat lebih diprioritaskan pada kebutuhan dasar seperti makanan.

4. Secara parsial variabel IPM atau Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi non pangan masyarakat di Barlingmascakeb tahun 2013-2022. Hal ini karena semakin meningkat IPM maka produktivitas semakin meningkat yang menjadi dorongan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Sehingga IPM yang meningkat dapat menjadi pendorong peningkatan daya beli masyarakat untuk konsumsi non pangan.

B. Implikasi

Adapun implikasi berdasarkan hasil penelitian ini yaitu:

1. PDRB berpengaruh terhadap konsumsi non pangan masyarakat, sehingga diperlukan kebijakan yang dapat mendorong peningkatan PDRB setiap tahunnya. Peningkatan PDRB di wilayah Barlingmascakeb dipengaruhi adanya peningkatan produksi di seluruh lapangan usaha yang menggambarkan bahwa produktivitas dan perekonomian mengalami peningkatan. Kebijakan dalam upaya peningkatan PDRB yang dilakukan pemerintah di Barlingmascakeb tergolong sudah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa kebijakan yang perlu dievaluasi dan dioptimalkan kembali, kebijakan tersebut sebagai berikut:
 - a. Kebijakan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Banjarnegara masih perlu dioptimalkan dan ditingkatkan kembali

dalam hal infrastruktur pariwisata seperti untuk mengatasi kemacetan saat puncak kunjungan wisatawan.

- b. Kebijakan pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam peningkatan PDRB yaitu melalui pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) perlu dievaluasi karena masih ada permasalahan berupa ketidakpastian pasar dan keterbatasan peralatan dalam IKM logam Purbalingga dan pada IKM rambut palsu masih terkendala bahan baku dan tenaga kerja. Sehingga pemerintah Kabupaten Purbalingga dapat menerapkan kebijakan berupa dukungan modal, mendorong diverifikasi produk, serta membangun jaringan dan kolaborasi seperti membuka pasar baru bagi pelaku industri kecil menengah agar bisa memasarkan produknya lebih luas dan mengatasi masalah ketidakpastian pasar. Selain itu pada IKM rambut palsu kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah melalui pengembangan jaringan pasokan dan distribusi agar lebih stabil dan berkelanjutan.
- c. Kebijakan pemerintah Kabupaten Banyumas dalam hal peningkatan infrastruktur perlu dievaluasi dan dianalisis lagi karena masih terdapat permasalahan penundaan pembangunan atau mangkrak seperti yang terjadi di Sokawera Banyumas. Sehingga pemerintah perlu meningkatkan transparansi baik dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

- d. Kebijakan pengembangan kawasan industri di Kabupaten Cilacap untuk peningkatan PDRB masih menimbulkan permasalahan pada lingkungan serta masih adanya sengketa lahan dengan masyarakat. Sehingga upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut agar manfaat terhadap PDRB dapat optimal yaitu dengan menetapkan regulasi yang ketat dalam pengolahan limbah dan emisi industri dan pengawasan yang ketat. Selain itu dalam mengatasi sengketa lahan dengan masyarakat pemerintah dapat melakukan upaya dialog publik dan keterbukaan terhadap masyarakat tentang rencana, proses, hingga keputusan serta pemberian kompensasi yang adil kepada masyarakat.
 - e. Kebijakan pemerintah Kabupaten Kebumen dalam pengembangan infrastruktur sudah cukup baik namun masih memiliki kekurangan. Target dalam pembangunan drainase, jalan dan jembatan masih belum tercapai. Sehingga pemerintah Kabupaten Kebumen dapat melakukan upaya dengan penyediaan anggaran yang memadai melalui peningkatan investasi.
2. Jumlah penduduk secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap konsumsi non pangan masyarakat. Akan tetapi kenaikan jumlah penduduk setiap tahunnya harus menjadi perhatian pemerintah. Upaya pemerintah dalam pengendalian jumlah penduduk yaitu dengan mengoptimalkan program keluarga berencana (dua anak lebih baik) agar beban tanggungan keluarga tidak terlalu besar. Selain itu dengan

peningkatan lapangan kerja agar jumlah pengangguran dapat menurun.

3. Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh terhadap konsumsi non pangan. Peningkatan IPM yang terjadi di Barlingmascakeb tahun 2013 hingga 2022 dikarenakan adanya kebijakan pemerintah yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kebijakan dalam upaya peningkatan IPM yang dilakukan sudah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa kebijakan yang perlu dievaluasi dan dioptimalkan kembali.

Peningkatan dalam bidang pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar yang belum terealisasi dengan baik karena masih ada masalah salah sasaran. Sehingga pemerintah diharapkan dapat lebih melakukan peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut. Selain itu dalam bidang fasilitas dan pelayanan kesehatan khususnya pada BPJS yang belum optimal. Sehingga pemerintah dapat memastikan fungsi pengawasan yang lebih oleh Kementerian Kesehatan sehingga tidak ada lagi penolakan terhadap pasien BPJS. Sementara program dalam bidang ekonomi sama dengan program peningkatan PDRB sehingga masih diperlukan evaluasi agar program dapat berjalan lebih baik.

Oleh karena itu untuk tetap menjaga agar kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup dapat terus meningkat yang ditunjukkan dengan peningkatan konsumsi non pangan diharapkan pemerintah

Barlingmascakeb tetap menjaga dan mengevaluasi bahkan menambahkan program-program baru untuk peningkatan IPM.

C. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini yaitu dalam penelitian ini tidak memperhitungkan variabel inflasi, tingkat harga dan selera karena keterbatasan data dan indikator. Berdasarkan studi sebelumnya variabel inflasi dan tingkat harga memengaruhi konsumsi non pangan secara negatif dan signifikan. Sehingga untuk peneliti selanjutnya bisa mempertimbangkan penambahan variabel tersebut agar dapat menjadi bahan literatur untuk penelitian selanjutnya.

